Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB II
TINJAUAN UMUM

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan umum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis karena kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat.[40]

Di Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 22E UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.[41]

Pemilu memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sarana pergantian pemerintahan secara konstitusional, sarana partisipasi politik masyarakat, dan sarana untuk

[40] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 181.
[41] Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 22E UUD 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

memperoleh legitimasi kekuasaan. Selain itu, pemilu juga menjadi indikator keberhasilan demokrasi suatu negara karena melalui pemilu masyarakat dapat menentukan pemimpin sesuai kehendaknya.

Dalam pelaksanaannya, pemilu harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung berarti pemilih memberikan suara sendiri tanpa perantara. Asas umum berarti seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih. Asas bebas berarti pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan pihak mana pun. Asas rahasia menjamin kerahasiaan pilihan pemilih. Sedangkan asas jujur dan adil menuntut seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu bertindak sesuai hukum dan tidak melakukan kecurangan.[42]

2. Tinjauan Umum Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu yang bertujuan menjaga agar seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang, kampanye ilegal, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya.

Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan pemilu di Indonesia adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau BAWASLU. BAWASLU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang

[42] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2020), hlm. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

bersifat tetap dan bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.[43]

Dasar hukum pembentukan dan kewenangan BAWASLU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, BAWASLU memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu.[44]

BAWASLU memiliki fungsi penting dalam menjaga integritas pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, BAWASLU melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu.

Selain melakukan pengawasan, BAWASLU juga memiliki kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, melakukan investigasi, memberikan rekomendasi, serta meneruskan pelanggaran kepada instansi yang berwenang. Dalam kasus tertentu, BAWASLU juga dapat memberikan putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu.

[43] Nurhayati, "Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Lex Administratum* 10, No. 1 (2022): https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/3135 hlm. 56.
[44] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Keberadaan BAWASLU sangat penting dalam menciptakan pemilu yang demokratis karena lembaga ini menjadi pengawas independen yang memastikan seluruh peserta pemilu mematuhi aturan hukum yang berlaku.[45]

3. Tinjauan Umum tentang Pengawas Kelurahan/Desa

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan bagian dari struktur pengawasan pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa. PKD dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa masing-masing.

Dasar hukum mengenai Pengawas Kelurahan/Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. PKD memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak pengawasan pemilu di tingkat masyarakat paling bawah.[46]

Tugas utama PKD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu di wilayah kerjanya, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, menerima laporan masyarakat, serta menyampaikan temuan dugaan pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Dalam praktiknya, PKD melakukan pengawasan terhadap:

a. Pemutakhiran Data Pemilih;

b. Pelaksanaan Kampanye;

[45] Rian Saputra, "Politik Uang dan Kerusakan Demokrasi Lokal," *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah* 9, No. 2 (2022): https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jdod/article/view/11952 hlm. 97.

[46] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

c. Distribusi Logistik Pemilu;

d. Pemungutan Dan Penghitungan Suara;

e. Praktik Politik Uang;

f. Netralitas Aparat Desa;[47]

g. Pelanggaran Pemilu Lainnya.

PKD memiliki peran strategis dalam mencegah praktik politik uang karena pengawas berada langsung di lingkungan masyarakat dan mengetahui kondisi sosial di wilayahnya. Dengan keberadaan PKD, pengawasan pemilu dapat dilakukan secara lebih dekat dan efektif.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, PKD sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta adanya tekanan politik dari pihak tertentu.

Meskipun demikian, PKD tetap memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu di tingkat desa atau kelurahan demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.[48]

4. Tinjauan Umum tentang Politik Uang

Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan dengan cara memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau keuntungan tertentu kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Praktik politik uang dianggap sebagai ancaman serius

[47] Andika Pratama, "Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Rechtsvinding* 12, No. 2 (2023): https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/189 hlm. 189.

[48] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

terhadap demokrasi karena dapat merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Dalam konteks pemilu, politik uang biasanya dilakukan oleh calon legislatif, tim sukses, atau pihak tertentu untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Bentuk politik uang dapat berupa pemberian uang tunai, sembako, bantuan sosial, hadiah, maupun fasilitas tertentu kepada pemilih menjelang pelaksanaan pemilu.

Politik uang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena pilihan masyarakat tidak lagi didasarkan pada kualitas calon atau program kerja, melainkan dipengaruhi oleh pemberian materi. Akibatnya, pemilu tidak berjalan secara jujur dan adil serta dapat menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas.[49]

Di Indonesia, praktik politik uang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan praktik politik uang, baik berupa sanksi administratif maupun pidana.

Praktik politik uang memiliki dampak negatif yang besar terhadap kehidupan demokrasi, antara lain:

a. Merusak Integritas Pemilu;
b. Menurunkan Kualitas Demokrasi;
c. Mendorong Terjadinya Korupsi Politik;
d. Melemahkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu;

[49] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

e. Menciptakan Ketidakadilan Dalam Kontestasi Politik.

Selain itu, politik uang juga dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat. Biaya politik yang tinggi akibat praktik politik uang sering mendorong pejabat terpilih melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengembalikan modal politiknya.

Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap politik uang menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan demokratis.[50]

C. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Teori pengawasan merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga dalam memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), pengawasan menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui pengawasan yang efektif, berbagai

[50] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang, dapat dicegah maupun ditindak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut George R. Terry, pengawasan (*controlling*) merupakan proses untuk menentukan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan tersebut, serta apabila diperlukan melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan berlangsung sesuai standar, prosedur, dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengawasan memiliki fungsi preventif sekaligus korektif dalam setiap pelaksanaan kegiatan.[51]

Pendapat lain dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah suatu kegiatan selesai, tetapi juga dilaksanakan secara terus-menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.[52]

[51] George R. Terry, *Principles of Management*, Richard D. Irwin Inc., Homewood, Illinois, 1972, hlm. 458.

[52] Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dalam perspektif administrasi publik, pengawasan memiliki beberapa tujuan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggara, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pengawasan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan suatu kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau masih memerlukan perbaikan.[53]

Secara umum, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan. Bentuk pengawasan ini dapat berupa sosialisasi peraturan, pendidikan politik kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, pemberian imbauan kepada peserta pemilu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Sementara itu, pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Pengawasan ini dilakukan melalui penerimaan laporan atau temuan, klarifikasi kepada pihak terkait, pengumpulan alat bukti, serta penyampaian hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya hingga tingkat

[53] Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

desa, yaitu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKD memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu di wilayah kerjanya, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran, melakukan penelusuran terhadap temuan, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, PKD merupakan ujung tombak pengawasan pemilu karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki akses yang lebih dekat terhadap potensi terjadinya pelanggaran di tingkat desa.[54]

2. Teori Demokrasi

Teori demokrasi merupakan teori yang menjelaskan mengenai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat

[54] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 319.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan jalannya pemerintahan dan memilih pemimpin melalui mekanisme yang sah, salah satunya melalui pemilihan umum.

Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pemerintahan, serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Demokrasi juga menekankan adanya persamaan hak, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[55]

b. Macam-Macam Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa bentuk yang berkembang dalam sistem pemerintahan suatu negara, antara lain:

1) Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan tanpa melalui perwakilan. Dalam sistem ini, rakyat menyampaikan pendapat dan menentukan kebijakan secara langsung.

[55] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2) Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan merupakan sistem demokrasi di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan atas nama rakyat. Sistem ini banyak diterapkan di negara modern, termasuk Indonesia.

3) Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal merupakan sistem demokrasi yang menekankan kebebasan individu, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi.

4) Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini mengutamakan musyawarah mufakat, persatuan, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.[56]

c. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki beberapa prinsip penting, antara lain:

1) Kedaulatan Rakyat

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

2) Persamaan Hak

[56] *Ibid.*, hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

3) Kebebasan Berpendapat

Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara bertanggung jawab.

4) Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil

Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk menjamin kedaulatan rakyat.

5) Supremasi Hukum

Seluruh pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.[57]

d. Tujuan Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa tujuan penting dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1) Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

Demokrasi bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin dan arah pemerintahan.

2) Menjamin Hak Asasi Manusia

Demokrasi bertujuan melindungi hak-hak masyarakat, seperti hak berpendapat, hak memilih, dan hak memperoleh keadilan.

3) Menciptakan Pemerintahan yang Adil

[57] *Ibid.*, hlm.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Demokrasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

4) Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

5) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Demokrasi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.[58]

e. Demokrasi dalam Pemilu

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat secara bebas sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam praktiknya, demokrasi dalam pemilu sering menghadapi berbagai tantangan, salah satunya praktik politik uang. Politik uang merupakan tindakan memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi karena dapat menghilangkan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya.

[58] *Ibid.*, hlm. 70-71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Politik uang juga dapat merusak kualitas demokrasi karena pemilih tidak lagi menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, dan kualitas calon, melainkan dipengaruhi oleh imbalan materi. Akibatnya, pemilu tidak berjalan secara jujur dan adil.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam penelitian ini, teori demokrasi digunakan untuk menganalisis praktik politik uang serta efektivitas peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menjaga pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 agar berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.[59]

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan arah pemerintahan melalui mekanisme yang sah, salah satunya melalui pemilihan umum. Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pemerintahan, serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Konsep tersebut menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

[59] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2020), hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara bebas dan adil. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Demokrasi juga berkaitan erat dengan prinsip persamaan hak dan kebebasan politik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, demokrasi menuntut adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Dalam konteks penelitian ini, teori demokrasi digunakan untuk menganalisis praktik politik uang dalam pemilu. Politik uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena dapat mempengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya. Pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, dan kualitas calon, tetapi dipengaruhi oleh pemberian uang atau materi tertentu.

Praktik politik uang juga dapat mencederai asas kejujuran dan keadilan dalam pemilu karena menciptakan persaingan yang tidak sehat antar peserta pemilu. Akibatnya, kualitas demokrasi menjadi menurun dan tujuan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat tidak tercapai secara optimal.[60]

[60] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap politik uang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Pemilu yang bebas dari praktik politik uang akan menghasilkan pemerintahan yang lebih legitimate, bersih, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.[61]

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori yang menjelaskan mengenai hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan hukum. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan menjadi dasar legalitas bagi setiap tindakan pemerintah atau pejabat publik. Tanpa adanya kewenangan yang sah, suatu tindakan pemerintahan dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Kewenangan berasal dari pemberian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan demikian, setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan bagian tertentu dari kewenangan. Dalam pelaksanaannya, kewenangan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum.[62]

[61] Saldi Isra, *Pemilu dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 134.
[62] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dalam teori kewenangan dikenal adanya tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan asli oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah disertai tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Sedangkan mandat adalah pelimpahan pelaksanaan tugas kepada pejabat lain tanpa mengalihkan tanggung jawab.

Dalam konteks pengawasan pemilu, teori kewenangan digunakan untuk menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[63]

PKD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu di tingkat desa atau kelurahan, menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang, serta menyampaikan temuan pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Teori kewenangan juga menekankan bahwa penggunaan kewenangan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, kewenangan yang

[63] Andika Pratama, "Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Rechtsvinding* 12, No. 2 (2023): https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.189?utm hlm. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dimiliki PKD harus digunakan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.[64]

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Pasal 22E yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemilu, tugas dan kewenangan BAWASLU serta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), termasuk larangan praktik politik uang dan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

[64] Ahmad Rofiq, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2022): https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2050 hlm. 145.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur larangan politik uang dalam pemilihan kepala daerah serta ketentuan sanksinya.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu, yang mengatur tugas, fungsi, dan tata kerja pengawas pemilu termasuk Pengawas Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemilu.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang digunakan sebagai dasar hukum terhadap tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu dan praktik politik uang.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang mengatur tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 sebagai pedoman dalam proses pengawasan pemilu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu, yang mengatur mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran politik uang yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri